

**EFEKTIVITAS PENATAAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MAYBRAT**

Cicilia Yuspince Novela Syama
Npp. 29.1865
Asdaf Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email : ciciliasyama@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Local government administration is one of the elements needed in the implementation of local government. The administration has a role in achieving the goals of local government, one of which is to realize good governance. In administration, the right arrangement is needed so that the goals that have been set can be achieved, just like the administrative arrangement of government administration at the Maybrat Regional Secretariat which is an auxiliary element in the formulation of policies with the Regional Head. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze, outline obstacles, and provide solutions to overcome problems in the administration of government administration in the Regional Secretariat. **Method:** The method used in this study is a qualitative descriptive research method with an inductive approach. In obtaining this research data using 3 data collection techniques, namely Interview techniques, documentation techniques, and observation techniques. Then perfected by triangulation techniques, with 3 indicators that have been determined, namely the achievement of goals, integration, and adaptation. **Result:** The results of the study based on these indicators showed that the government's implementation in the Maybrat Regional Secretariat was not running effectively. This study concludes that the implementation of local government did not run effectively because of the problem of moving the regency capital and attacking koramil posts in Kisor, South Aifat District. Researchers suggest that they can solve the problems that occur so that the government can run well. **Keywords:** effectiveness, administration, regulation

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Administrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Administrasi memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang

baik (*good governance*). Dalam administrasi dibutuhkan penataan yang tepat sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, sama halnya seperti penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Maybrat yang merupakan unsur pembantu dalam perumusan kebijakan bersama Kepala Daerah. **Tujuan:** Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis, menguraikan hambatan, dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik Wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Kemudian disempurnakan dengan teknik triangulasi, dengan 3 indikator yang sudah ditentukan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. **Kesimpulan:** Hasil penelitian berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Maybrat tidak berjalan dengan efektif. kesimpulan daripada penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan dengan efektif karena permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten dan penyerangan pos koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan. Peneliti menyarankan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Administrasi, penataan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah di era reformasi saat ini adalah mometum yang tepat untuk menata ulang administrasi pemerintahan agar semakin efektif, efisien, dan demokratis sebagai perwujudan daripada *good governance* (pemerintahan yang baik). Penataan ulang administrasi pemerintahan memiliki definisi sebagai suatu transformasi dan inovasi atau pembaharuan terhadap berbagai kelemahan sebagai bentuk keikutsertaan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam perubahan globalisasi. Pada dasarnya administrasi pemerintahan bertujuan untuk melahirkan efisiensi, demokratisasi dan inovasi pada pemerintahan daerah. (Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., 2013).

Keutuhan negara juga dapat terjamin dari efektivitas administarasi pemerintahan . Maka dari itu, pemerintah daerah memiliki peranan yang penting dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik. Menyusun kebijakan daripada kebijakan publik merupakan bagian dari penerapan tugas administrasi (Andriansyah, 2015).

Pemerintah Kabupaten Maybrat merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia yang tidak akan terlepas daripada penataan administrasi dengan maksud mempercepat proses palayanan administrasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan agar efektif. Namun, banyak permasalahan ditemukan semenjak kepemimpinan Bupati Maybrat periode 2017-2022, seperti sistem penerimaan surat masuk/keluar dan sistem pelayanan administrasi kepada

masyarakat tidak berlandas pada peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan atau kekecewaan dari masyarakat. Kemudian setiap surat masuk dari masyarakat tidak dijawab oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selain itu kearsipan surat-menyurat sulit ditemukan di dalam kantor. Masalah lainnya, ialah konsep perencanaan dan pembangunan yang tertancum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak lengkap, setiap pimpinan daerah sebagian besar menggunakan SK pelantikan Bupati, dan juga para pimpinan daerah hanya menggunakan nota dinas Bupati atau penunjukkan-penunjukkan Bupati, serta sebagian besar kepala distrik tidak dilantik hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat tidak berjalan efektif dan menimbulkan berbagai permasalahan pada tatanan pemerintahan atau sistem pemerintahan Kabupaten Maybrat dan sudah melanggar prinsip dasar konstitusional. (Jurmadi, 2020)

Permasalahan tersebut merupakan penghambat dalam proses pelayanan administrasi pemerintah dan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika tidak ada pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien proses penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terlaksanakan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan terlaksanakan dengan penataan administrasi yang tepat melalui peran pemerintah dalam perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya (Taufiqurokhman & Satispi, 2018). Apabila penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan baik maka penataan administrasi dinilai tidak berfungsi sama sekali, karena penataan administrasi yang efektif akan tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Anggara, 2016). Dampak buruk dari kegagalan penataan administrasi dari rumusan kebijakan kepala daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan cenderung stagnan artinya pemerintahan yang tidak berjalan, jika pemerintahan tidak berjalan maka seluruh sistem pemerintahan tidak berfungsi secara maksimal. Sehingga tidak mampu untuk menjalankan semua tugas dan fungsi pemerintahan yang berujung pada kegagalan sistem pemerintahan di Kabupaten Maybrat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang mendasar dalam efektivitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Permasalahan-permasalahan tersebut ialah visi misi serta rencana strategis pembangunan dalam RPJMD yang ditetapkan bupati tidak dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati periode kedua (2017-2022).

Kebijakan yang dikeluarkan bupati tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Penataan administrasi di seluruh OPD dan kepala daerah tidak berjalan efektif. Selanjutnya setiap pimpinan daerah sebagian besar menggunakan SK Pelantikan Bupati, dan juga para pimpinan daerah hanya menggunakan nota dinas Bupati atau penunjukkan-penunjukkan Bupati, serta sebagian besar kepala distrik tidak dilantik dan permasalahan lainnya ialah

permasalahan pada pengelolaan surat masuk/keluar, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak lengkap serta kearsipan surat menyurat tidak ditemukan dalam kantor.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik melalui konteks penataan administrasi maupun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian M. Zikri Arifin, Marlon Sihombing, dan Heri Kusmanto berjudul efektivitas kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan administrasi pada bagian umum sekretariat daerah kabupaten Batu Bara menemukan bahwa dari segi pelayanan administrasi masih menunjukkan bahwa belum optimalnya pelayanan administrasi pendistribusian surat menyurat di lingkungan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh pegawai bagian umum serta belum optimalnya sarana prasarana sebagai faktor pendukung pendistribusian surat menyurat di bagian umum (Arifin et al., 2022). Penelitian Husnayaeni, Imran Ismail dan M, Rusli Engka menemukan bahwa dalam rangka menerapkan kualitas pelayanan administrasi bagian perlengkapan dan aset daerah dilihat dari kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan yang telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dijalankan dengan baik. Pada tataran faktor-faktor yang menghambat pelayanan administrasi bagian perlengkapan dan aset administrasi sekretariat daerah Kabupaten Wajo dilihat pengembangan kompetensi ASN dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan (Diklat) ASN yaitu Struktural/Penjurangan/PIM dan Diklat Teknis/Fungsional, dimana pada setiap tahun anggaran diprogramkan untuk ikut Diklat (Ismail & Engka, 2020). Penelitian Zakki Fuad Khalil dan Azizah Fitri mengenai tata kelola dan pelayanan administrasi menemukan bahwa tata kelola dan pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan pemerintah dan administrasi tetap berpedoman dan menjalankan prinsip akuntabilitas, daya tanggap, consensus, efektivitas dan efisiensi dan partisipasi sebagai tugas utama dalam mengedepankan amanah dan profesional terhadap tugas pelayanan yang melekat bagi ASN untuk melayani kepentingan publik. Namun, pada praktiknya masih terdapat kelemahan dan kendala dalam menjalankan pelayanan administrasi, dimana kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi menjadi tanggungjawab yang dianggap masih belum maksimal perannya, kemudian pelaksanaan standar operasional prosedur belum *Applicable*, dan masih maraknya budaya *Feodal* yang masih di praktikkan di kalangan pegawai (Khalil & Fitri, 2019). Penelitian Hernimawati, Surya Dailiati dan Sudaryanto berjudul pengelolaan pemerintahan di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar menemukan bahwa pembangunan berbasis masyarakat dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berhukum serta perlakuan yang adil. Hambatannya, keterbukaan kurang dimanfaatkan sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksional elektronik. Kemudian tidak semua pelayanan

berbasis online serta terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur sehingga diperlukan perbaikan (Dailiati, 2004).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks yang dilakukan mengenai penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat yang di kaji melalui kebijakan pemerintah daerah dan juga ketidaksesuai yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi penataan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada bagian Sekretariat Daerah yang menjadi fokus utama dalam penelitian, selain itu penelitian ini juga di tinjau dari berbagai permasalahan mendasar seperti pemindahan ibu kota dan penyerangan oleh KKB yang sangat berpengaruh terhadap penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Teori yang digunakan ialah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985 : 53) (Steers, 1985).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui secara jelas tentang efektivitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat.

II. METODE

Penulis mengumpulkan data dari melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian disempurnakan dengan teknik triangulasi (Prof.Dr.Sugiyono, 2015). Dalam mengumpulkan data secara kualitatif, sumber data dalam penelitian ialah inti dari mana informasi itu didapatkan. Penulis mendapatkan informasi melalui informan yang telah ditetapkan dan mampu memberikan gambaran tentang efektivitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Informan menjadi begitu penting, tidak hanya sebatas jawaban, tetapi selaku pemilik informasi yang tepat dan akurat serta dianggap bisa digali informasinya (Simangunsong, 2017). Penelitian secara kualitatif dilakukan dengan pendekatan induktif yang diawali dengan bukti dilapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan lalu dikaitkan dengan konsep, dalil/hukum yang lalu dilanjutkan dengan pernyataan hingga kesimpulan (Dr. Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, 2019). Dalam penelitian ini terdapat 11 informan yang diwawancarai oleh penulis untuk memperoleh informasi secara tepat dan dapat divalidasikan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Namun saat ini Kabupaten Maybrat sedang berada pada situasi yang tidak

kondusif, karena terjadi penyerangan oleh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penyerangan tersebut sangat berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat salah satunya adalah aktivitas perkantoran yang tidak berjalan secara normal. Sehingga penulis hanya berhasil mewawancarai 7 dari 11 informan yang telah ditentukan sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat

Penulis menganalisis efektivitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat dengan menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985 : 53), efektivitas dapat diukur melalui 3 indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan juga adaptasi

3.1.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan tahapan-tahapan yang bersifat sistematis dalam melihat sejauh mana tujuan itu tercapai, hal ini dapat berupa waktu ataupun sasaran pencapaian tujuan. Dalam mencapai tujuan terdapat 5 (lima) dimensi yang digunakan oleh penulis, yaitu :

3.1.1.1. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, dalam hal ini ialah keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Transparansi merupakan salah satu aspek penunjang dalam proses pelayanan administrasi, tujuan daripada transparansi adalah untuk mempermudah pelayanan dan mempermudah akses informasi kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Maybrat memiliki alur konsultasi bagi setiap perangkat desa, yaitu klinik Konsultasi “Amah Mayo Ntu Sanet Boo”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat dan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Sekretariat Daerah belum sepenuhnya transparan, hal ini dikarenakan website resmi Kabupaten Maybrat tidak aktif dan pemerintah hanya menggunakan papan informasi sebagai media dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu kondisi kantor Sekretariat Daerah saat ini tidak kondusif dan tidak ada aktivitas perkantoran sehingga masyarakat tidak bisa menerima pelayanan dan mengadukan permasalahannya terkait dengan pelayanan administrasi maupun pelayanan publik di Sekretariat Daerah.

3.1.1.2. Responsivitas

Responsivitas dalam hal ini ialah bagaimana keterlibatan dan sikap Aparatur Negara dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Keterlibatan aparatur negara sangat dibutuhkan karena pada dasarnya aparatur negara memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat, aparatur negara harus responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat. Aparatur Negara dituntut untuk siap menghadapi masyarakat dalam situasi apapun, terutama dalam memberikan pelayanan dan menjawab keluhan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan beragam kebutuhan yang tidak terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan, maka penulis menyimpulkan bahwa Pelayanan administrasi yang bagus, dapat dinilai dari respon pegawai terhadap berbagai keluhan masyarakat dan sudah menjadi suatu tanggung jawab pegawai yang harus diselesaikan. Dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat, pegawai harus memiliki sikap yang sigap dan tanggap terhadap berbagai keluhan masyarakat, pegawai harus memiliki respon yang baik terhadap semua keluhan masyarakat, namun tetap berpedoman kepada prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan, karena tidak semua keluhan dan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

3.1.1.3. Keadilan

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan tetap merata dan tidak ada perlakuan khusus bagi suku-suku tertentu yang ada di Kabupaten Maybrat. Sehingga tidak timbul kesenjangan dalam proses pelayanan dalam hal ini pelayanan administrasi pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Maybrat.

3.1.1.4. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan Efisiensi pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat terkait dengan proses pelayanan administrasi yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat harus efektif dan efisien, artinya penataan dan pengelolaan serta proses pelayanan administrasi harus seefektif mungkin dan berpedoman pada prosedur dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah, dapat disimpulkan bahwa efektifitas dan efisiensi pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat belum berjalan secara efektif. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, tidak ada satupun aktivitas dari perkantoran yang ada di Kabupaten Maybrat, tidak ada pegawai yang berada di dalam kantor. Jika tidak ada satupun pegawai di kantor maka masyarakat tidak dapat menerima pelayanan, baik pelayanan administrasi

maupun pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.

3.1.1.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas dalam hal ini ialah pertanggungjawaban terhadap prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam proses pelayanan administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretariat Daerah dan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pegawai negeri yang berada pada instansi pemerintahan di lingkup Sekretariat Daerah, selain itu pada saat melakukan observasi peneliti tidak menemukan dokumen-dokumen penting seperti Lakip, Bahkan RPJMD dan RPJPD yang seharusnya menjadi pedoman pada penyusunan rencana kerja instansi tidak ditemukan pada kantor Sekretariat Daerah.

3.1.2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran pada kemampuan suatu instansi melalui sosialisai maupun komunikasi dengan instansi lainnya. Ada beberapa dimensi yang digunakan, yaitu sebagai berikut.

3.1.2.1. Sosialisasi

Sosialisasi terkait dengan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat daerah dalam hal ini baik dari bagian umum maupun pemerintahan pada Sekretariat Daerah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai pelatihan dan melalui sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum Kabupaten Maybrat, sosialisasi terkait penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat terus di upayakan namun tidak semua diterima oleh masyarakat, salah satu penyebabnya adalah budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat, masyarakat masih tetap berpegang kepada budayanya ketika mengajukan keluhan dalam pelayanan administrasi yang mana tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, tidak hanya budaya yang menjadi kendala dalam sosialisasi, namun kendala lainnya adalah permasalahan

pemindahan ibukota Kabupaten yang menyebabkan tidak adanya aktifitas di kantor sehingga pemerintah Kabupaten Maybrat harus membangun kembali infrastruktur yang baru, selain itu kejadian penembakan di Kisor juga menjadi salah kendala bagi aparat negara untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

3.1.2.2. Partisipasi

Partisipasi terkait dengan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah dalam hal ini melibatkan masyarakat dan menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan administrasi yang ada pada Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Maybrat, keterlibatan masyarakat dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah secara hukum tetap diperhatikan dan berpedoman pada prosedur dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, setelah terjadi permasalahan pemindahan ibukota dan juga penembakan di Kisor, menyebabkan aktivitas di kantor diberhentikan, hampir seluruh pjabat-pejabat pemerintah dan anggota DPRD tidak berada di kantor. Selain itu banyak masyarakat yang takut untuk kembali ke perkampungan dan lebih memilih untuk mengungsi di hutan, meskipun sudah dilaksanakan pengamanan oleh anggota TNI atau Polri, namun dari pemerintah Kabupaten Maybrat sendiri masih kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang bertahan di hutan, terutama masyarakat yang berada pada Distrik Aifat Timur Jauh.

3.1.2.3. Koordinasi

Koordinasi yang dimaksud pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat adalah koordinasi antara Sekretariat daerah dan OPD terkait. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Koordinasi bertujuan untuk membentuk berbagai kebijakan dan sebagai forum diskusi dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

3.1.3. Adaptasi

Adaptasi dapat diartikan sebagai penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Adaptasi yang dimaksud dapat berupa penyesuaian terhadap kemampuan individu.

3.1.3.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana terkait penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Maybrat ialah berbagai fasilitas yang tersedia pada kantor Sekretariat Daerah dan OPD terkait yang mendukung terlaksananya penataan administrasi dan juga pelayanan administrasi maupun pelayanan publik kepada masyarakat dalam mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sarana dan prasarana yang menjadi perhatian utama ialah berbagai fasilitas yang tersedia pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, yaitu peralatan elektronik seperti komputer, tempat antrian pada bagian pelayanan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Namun fasilitas-fasilitas tersebut belum tersedia pada kantor Sekretariat Daerah, sehingga menjadi kendala dalam proses pelayanan administrasi kepada masyarakat, hal ini disebabkan oleh pembangunan kembali kantor pemerintahan di Kabupaten Maybrat akibat permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat yang terjadi pada tahun 2013. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan pembangunan ditahun ini, agar aktivitas kantor dapat kembali berjalan dan masyarakat dapat menerima pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

3.1.3.2. Keterampilan (*skill*) dan Kesiapan

Berkaitan dengan keterampilan (*Skill*) dan kesiapan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Maybrat, berdasarkan pengamatan peneliti kemampuan aparat pemerintah pada umumnya sudah sesuai dengan bidangnya, namun masih ditemukan beberapa aparat pemerintah yang malas untuk mengembangkan kemampuannya selain itu ada beberapa aparat pemerintah yang tidak sesuai penempatan jabatannya pada beberapa instansi pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat

Tabel 3.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maybrat, 2020

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SMP/Sederajat	0	0	0
SMA/Sederajat (37)	5	1	6
Diploma I, II/ Akta I, II	0	0	0
Diploma III/Akta III/Sarjana	1151	799	1950

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
Muda			
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	7	0	7
Jumlah	1163	800	1963

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Sekretaris Daerah dapat di tarik kesimpulan bahwa kemampuan (skill) yang dimiliki pemerintah Kabupaten Maybrat sudah baik, namun banyak aparat pemerintah yang belum memahami tugas dan fungsinya dengan baik sehingga masih terdapat ketidaksesuaian pada penempatan jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Hal ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Maybrat belum memiliki kesiapan yang baik dalam mengelola pemerintahan terutama dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat.

3.2. Hambatan pada Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat

Dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut :

3.2.1. Permasalahan Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat yang terjadi pada Tahun 2013

Berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat (Bab II, bagian keempat, pasal 7) bahwa ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat (*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat*). Namun pada tahun 2013 terjadi pemindahan ibukota Kabupaten ke Ayamaru, Distrik Ayamaru yang menimbulkan konflik selama lebih dari 8 tahun dan diselesaikan pada tahun 2019 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2019 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. (*Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat Dari Distrik Ayamaru Ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat*, 2019)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Sekretariat Daerah penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat menyebabkan pelayanan administrasi pada Kantor Sekretariat Daerah tidak berjalan dengan baik, selain itu aktifitas kantor juga tidak berjalan dikarenakan letak wilayah administrasi Sekretariat Daerah yang berada di dua distrik, yaitu

Distrik Ayamaru dan Distrik Kumorkek.

3.2.2. Penyerangan Pos Koramil Kisor oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang menyebabkan 4 anggota TNI gugur

KKB merupakan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua yang akhir-akhir ini menyerang anggota TNI atau Polri bahkan masyarakat sipil sering menjadi korban dari penyerangan yang dilakukan oleh KKB. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Maybrat dapat disimpulkan bahwa penyerangan yang terjadi di Kisor, Distrik Aifat Selatan menyebabkan aktifitas pemerintahan di Kabupaten Maybrat menjadi terkendala. Para pegawai merasa tidak aman dan takut untuk bertugas di kantor selain itu banyak masyarakat yang mengungsi ke hutan akibat penyerangan KKB. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada daerah konflik, hampir sebagian besar masyarakat mengungsi ke hutan dan beberapa jalan penghubung diputuskan oleh KKB agar anggota TNI atau Polri tidak memiliki akses untuk menangkap anggota KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Saat ini pemerintah Kabupaten Maybrat telah bersinergi bersama anggota TNI atau Polri untuk melakukan pengamanan pada Kabupaten Maybrat, terutama pada wilayah Kisor, Distrik Aifat Selatan. Oleh sebab itu para aparat pemerintah terutama bupati Kabupaten Maybrat selaku pemimpin Kabupaten Maybrat, seluruh unsur pemerintah harus kembali melaksanakan aktifitas dan harus melakukan pendekatan dengan masyarakat agar masyarakat dapat kembali ke perkampungan dan menerima pelayanan baik pelayanan administrasi maupun pelayanan publik yang memadai.

3.2.3. Politik Balas Budi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, dapat disimpulkan bahwa salah satu penghambat jalannya pemerintahan ialah politik kearifan lokal yang diterapkan pada Sekretariat Daerah. Politik ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam struktur organisasi maupun penataan pemerintahan secara administratif sehingga banyak pegawai yang hanya ditempatkan pada bagian-bagian pada Sekretariat Daerah, namun tidak memahami tugas dan fungsinya pada bagian tersebut.

3.3. Solusi yang dapat diberikan dalam meningkatkan efektivitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat

Solusi dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat daerah berasal dari seluruh aspek, yaitu dari pihak pemerintah Kabupaten Maybrat maupun Masyarakat. Beberapa solusi yang dapat diberikan dalam meningkatkan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah agar dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut :

3.3.1. Kepemimpinan Yang Efektif

Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah. Dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Apabila kepemimpinan tidak efektif maka akan berdampak buruk terhadap tata kelola pemerintahan termasuk penataan administrasi sendiri, karena penataan administrasi tidak terlepas daripada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kepemimpinan yang efektif berasal dari pemimpin yang berkompeten dan memahami tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin.

3.3.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat. Oleh sebab itu Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Maybrat perlu untuk dikembangkan. Pengembangan yang dimaksud ialah dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis serta pengembangan kompetensi dalam bidang teknologi dan informasi serta penanaman nilai-nilai moral kepada aparat pemerintah Kabupaten Maybrat. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu langkah yang tepat dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing, maka penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan baik sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.3.3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip utama pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh sebab itu dibutuhkan peningkatan pada tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan akuntabilitas pada pemerintahan dan pengambilan kebijakan oleh Kepala Daerah sebagai pemimpin. Peningkatan tata kelola yang baik sangat berdampak pada kehidupan masyarakat setempat, sehingga harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar pemerintah daerah tidak hanya mempertanggungjawabkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan tetap juga mampu meningkatkan daya saing daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas merupakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah di

tetapkan oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat dalam hal ini tidak efektif dalam melakukan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat, terbukti dari aspek-aspek yang belum dipenuhi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat yaitu aspek efektif dan efisien, akuntabilitas, sarana dan prasana serta keterampilan (*skill*). Penulis menemukan temuan penting yaitu dari segi pelayanan administrasi yang dilakukan pada Sekretariat Daerah belum berjalan secara optimal, salah satunya adalah pengelolaan surat menyurat yang belum dilaksanakan secara maksimal dan tidak dijumpai dokumen-dokumen penting pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Sama halnya pada penelitian Penelitian M. Zikri Arifin, Marlon Sihombing, dan Heri Kusmanto yang menemukan bahwa pelayanan administrasi surat menyurat tidak dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di sekretariat Daerah kabupaten juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) namun pada praktiknya belum memenuhi aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan masih terpadat praktik politik dengan sebutan politik balas budi, hal ini selaras dengan penelitian Penelitian Zakki Fuad Khalil dan Azizah Fitri mengenai tata kelola dan pelayanan administrasi menemukan bahwa tata kelola dan pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang menemukan bahwa tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek pemerintahan yang baik. Selanjutnya penataan administrasi juga tidak terlepas dari beberapa hambatan yang menjadi penyebab penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan secara efektif, yaitu sumber daya manusia yang belum berkompeten dan belum mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pekerjaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, hal ini sesuai dengan penelitian Husnayaeni, Imran Ismail dan M, Rusli Engka yang menemukan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten menjadi faktor penggerak dalam pelaksanaan pelayanan administrasi. Temuan lainnya pada penelitian ini ialah permasalahan keterbukaan informasi dan penggunaan teknologi yang belum optimal oleh Sekretariat daerah dalam melaksanakan pelayanan administrasi sehingga proses pelayanan menjadi terhambat dan masyarakat tidak menerima pelayanan secara maksimal, hal ini sama seperti penelitian Hernimawati, Surya Dailiati dan Sudaryanto berjudul pengelolaan pemerintahan di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar menemukan bahwa keterbukaan kurang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam penyaluran informasi kepada masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan fakta menarik dalam penelitian ini dimana penyebab pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat ialah permasalahan pemindahan ibukota yang terjadi selama lebih dari 8 tahun hingga baru terselesaikan dengan adanya penerbitan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat. Fakta lainnya ialah kondisi Kabupaten yang tidak kondusif akibat penyerangan oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dan kebijakan Bupati yang tidak terlaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan pemerintahan hingga kini tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat dalam melakukan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat tidak efektif, terbukti dari aspek-aspek yang belum dipenuhi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat yaitu aspek efektif dan efisien, akuntabilitas, sarana dan prasana serta keterampilan (*skill*).

Dalam Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat ada 3 (tiga) hambatan yang di hadapi oleh Sekretariat Daerah, yaitu Permasalahan pemindahan ibukota kabupaten Maybrat yang terjadi pada tahun 2013, Penyerangan Pos Koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan, Budaya Kearifan Lokal (Politik balas budi). Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) solusi yang dapat diberikan dalam meningkatkan efektivitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, yakni melalui kepemimpinan yang efektif, pengembangan sumber manusia, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian serta kondisi lokasi penelitian yang tidak kondusif akibat penyerangan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa masih awalan penelitian, oleh sebab itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada Kabupaten Maybrat dengan kajian permasalahan mengenai penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat, khususnya pada Sekretariat Daerah lagi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada sekretaris daerah Kabupaten Maybrat beserta jajaran yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekretariat daerah Kabupaten Maybrat, serta seluruh

pihak yang membantu proses penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah. (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa*.
- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. In *Cv Pustaka Setia*.
- Arifin, M. Z., Sihombing, M., & Kusmanto, H. (2022). Efektifitas Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2379–2390. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1080>
- Dailiati, S. (2004). *Pengelolaan Pemerintahan Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. 0761.
- Dr. Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, M. S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Ismail, I., & Engka, M. R. (2020). Pelayanan Administrasi Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public ...*, 1(1). <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa/article/view/95>
- Jurmadi, K. (2020). *VISI MISI BUPATI MAYBRAT DINILAI GAGAL TOTAL*. Kabar Publik Id. <https://kabarpublik.id/2020/06/30/visi-misi-bupati-maybrat-dinilai-gagal-total/>
- Kabupaten Maybrat Dalam Angka 2022. (2022). *Kabupaten Maybrat Dalam Angka 2022*, 1–68.
- Khalil, Z. F., & Fitri, A. (2019). Tata Kelola Dan Pelayanan Administrasi. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.461>
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumorkeke Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat*. (2019).
- Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., A. (2013). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan (mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik)* (Sabda Ali Mifka (Ed.)). Refika Adimata.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan r & d)*.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.

Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. *Umj Press 2018*, 266.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat. (n.d.).

